

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Lokal Di Desa Balongdowo  
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**

**Oriza Satyva<sup>1)\*</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

<sup>1)</sup> ostyvaa1406@gmail.com, <sup>2)</sup> isnaagustina@umsida.ac.id

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi lokal menurut tiga aspek utama teori Hutomo, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan, yaitu pertama, dari aspek sumber daya manusia dan alam, pelaku UMKM sudah melakukan promosi di media sosial untuk mengenalkan produk UMKM dan pemerintah desa membantu para pelaku UMKM dalam hal administratif seperti mengeluarkan surat keterangan usaha. Kedua, dari aspek sarana dan prasarana, pelaku UMKM membuat produk olahan untuk pengiriman luar kota dan mendapat bantuan modal dari dinas koperasi. Ketiga, dari aspek permodalan, pelaku UMKM dalam membangun usaha menggunakan modal pribadi yang ditambah dengan modal dari pihak eksternal dan pemasaran dilakukan secara offline dan online.

**Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Teori Hutomo, UMKM Lokal**

***Abstract***

*The purpose of this study was to analyze and describe efforts to empower the community's economy through a local economic approach according to three main aspects of Hutomo's theory, namely resources, infrastructure, and capital. The research method applied is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate findings, namely first, from the aspect of human and natural resources, MSME actors have promoted on social media to introduce MSME products and the village government helps MSME actors in administrative matters such as issuing business certificates. Second, from the aspect of facilities and infrastructure, MSME actors make processed products for out-of-town shipping and receive capital assistance from the cooperative office. Third, from the aspect of capital, MSME actors in building a business use personal capital supplemented by capital from external parties and marketing is carried out offline and online.*

**Keywords: Community Empowerment, Hutomo's Theory, Local UMKM**

## **A. LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, PDB nasional, dan investasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar global dan mendorong lebih banyak wirausahawan baru. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ekonomi lokal melalui penguatan UMKM menjadi strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ekonomi lokal merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu wilayah atau komunitas tertentu, termasuk sumber daya alam, manusia, serta kelembagaan yang ada. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menggali potensi lokal secara optimal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Menurut teori (Hutomo, 2000), ekonomi lokal bertumpu pada tiga faktor utama yang saling berkaitan, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan.

Pertama, sumber daya mencakup pemanfaatan sumber daya manusia dan alam secara bijak, seperti keterampilan warga, ketersediaan bahan baku lokal, serta pengetahuan tradisional yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Kedua, sarana dan prasarana mencakup infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran, seperti alat produksi, tempat usaha, serta akses informasi dan teknologi yang mendukung efisiensi usaha. Ketiga, permodalan

berfungsi sebagai penggerak utama dalam pengembangan usaha lokal, baik yang bersumber dari modal pribadi, dukungan pemerintah, lembaga keuangan, maupun mitra swasta, yang harus dikelola.

Ketiga faktor ini menjadi fondasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, termasuk di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tempat penelitian penulis, karena dapat mengarahkan strategi pemberdayaan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, keberlanjutan usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan data dari *website opendata.sidoarjokab.go.id*, tercatat jumlah UMKM tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 151.399 UMKM. Dimana UMKM di Sidoarjo ini setiap tahunnya melakukan inovasi dengan perkembangan digitalisasi yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Kabupaten Sidoarjo juga mengalami perkembangan pesat karena potensi pariwisata, industri, perdagangan, serta UMKM yang ada di wilayahnya yaitu salah satunya sektor perikanan seperti pertambakan ikan bandeng dan udang windu, serta kampung nelayan kupang yang dikelola dengan baik dan terarah. Hingga dibangun Bursa Kupang yang menampung 33 kios UMKM perdagangan makanan lontong kupang khas Sidoarjo di daerah Gedangan. Di lain sisi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah UMKM di Kecamatan Candi sebanyak 4.163, di mana di Desa Balongdowo sendiri berjumlah 125 UMKM yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Candi, Sidoarjo Tahun 2023**

Kelurahan	2023
Sumorame	153
Ngampelsari	250
Balonggabus	86
Balongdowo	125
Kendalpecabean	205
Kedungpeluk	183
Kalipecabean	292
Klurak	100
Kebonsari	370
Gelam	172
Candi	232

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2023)

Mayoritas mata pencaharian warga Desa Balongdowo yaitu sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Namun, dari beberapa mayoritas pekerjaan warga tersebut, warga Desa Balongdowo bermata pencaharian sebagai nelayan kupang karena desa ini memiliki sungai yang langsung bermuara ke laut dan sering disebut sebagai kampung nelayan. Kupang sendiri merupakan jenis kerang yang tergolong dalam binatang lunak dan banyak ditemui di dasar perairan berlumpur atau perairan yang dekat dengan pantai. Kupang dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, mulai dari lontong kupang, petis kupang, kerupuk kupang dan olahan kupang lainnya. Sehingga, UMKM yang berkembang di desa ini lebih dominan ke arah pengelolaan SDA yang ada yaitu kupang. Adapun beberapa contoh UMKM di Desa Balongdowo yaitu argoindustri petis kupang, *home industry* kupang kering dan kupang basah, kupang krispi, telur asin Pak Poh, sentra produksi kerupuk (kerupuk puli bawang mentah), hingga produksi kerajinan tangan (Arisky & Satriya, 2022).

Meskipun potensi ekonomi

berbasis kupang di Desa Balongdowo cukup menjanjikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terbentuk paguyuban atau kelompok khusus yang mewadahi pelaku UMKM kupang untuk saling berbagi pengetahuan, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat posisi tawar di pasar. Sejauh ini, pelaku UMKM masih berdiri sendiri-sendiri dan menjalankan usahanya secara individu. Namun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan komitmennya melalui pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM, terutama dalam hal pengolahan produk dan pemasaran digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, Desa Balongdowo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan perekonomian warga Desa Balongdowo. Namun, masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi mereka, yaitu pertama, minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang dan lebih memilih sebagai buruh pabrik, pedagang, dll. Kedua keterbatasan akses informasi. Ketiga, kurangnya pemasaran produk UMKM. Tujuan penelitian ini

untuk menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal di Desa Balongdowo.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu maupun kelompok dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Menurut (Hutomo, 2000), pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, dan pasar. Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi lemah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Tiga faktor utama yang ditekankan dalam teori Hutomo mencakup: Pertama, sumber daya manusia dan alam, pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor terpenting, dimana sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya yang cukup penting karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, permodalan, merupakan pemberian modal yang tidak menimbulkan ketergantungan kepada masyarakat, serta dapat mendorong pelaku UMKM agar usaha yang dimiliki dapat berkembang. Ketiga, prasarana produksi dan pemasaran, tumbuhnya suatu usaha diperlukan adanya prasarana produksi dan pemasaran jika hasil produksi kemudian tidak di pasarkan akan sia-sia.

Selain itu, (Haslinah et al., 2023) berpendapat bahwa pemberdayaan harus

mencakup penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kehidupannya. Pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi merupakan proses pembelajaran sosial yang menciptakan masyarakat yang partisipatif, mandiri, dan berdaya.

### **2. Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat**

Ekonomi lokal mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Menurut (Nugroho & Andarini, 2020), ekonomi lokal berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi, memperkuat identitas budaya lokal, serta memperluas lapangan kerja di daerah. Dalam konteks desa, ekonomi lokal bisa berkembang dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, hingga kuliner khas daerah yang berbasis pada keunikan sumber daya lokal.

Praktik baik pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal dapat ditemukan dalam berbagai program berbasis komunitas yang menekankan pada penguatan jejaring, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pelatihan terpadu. Sebagai contoh, program kampung tematik seperti *Kampung Batik*, *Kampung Wisata Kuliner*, dan *Kampung Kerajinan* di berbagai daerah telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan warga, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas pasar melalui branding lokal. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pendamping lokal dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Integrasi Teori dan Praktik Di Desa Balongdowo**

Dalam konteks Desa Balongdowo, pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilihat melalui pengolahan kupang sebagai produk unggulan desa. Namun, berdasarkan temuan lapangan, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan akses permodalan, informasi, dan pemasaran, belum terbentuknya kelompok usaha (paguyuban), dan rendahnya regenerasi tenaga kerja muda. Oleh karena itu, integrasi antara teori Hutomo dan praktik pemberdayaan ekonomi lokal perlu dikembangkan lebih jauh melalui kebijakan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, pembentukan paguyuban UMKM kupang, serta pengembangan sarana distribusi dan promosi digital. Implementasi ekonomi lokal yang berorientasi pada pemberdayaan akan menjadi efektif apabila dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi riil masyarakat desa.

### **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi lokal. (Rifa'i, 2023) Lokasi penelitian ini berada di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat mendukung pengumpulan data yang relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh

berdasarkan data data yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Asrulla et al., 2023). Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala desa Balongdowo serta pelaku UMKM Kupang, guna memperoleh informasi yang akurat terkait pemberdayaan ekonomi lokal. Teknik analisis ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data *non numeric* menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian (Tojiri et al., 2023). Adapun analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

### **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bagian ini akan mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan pertama adalah minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang, karena mereka lebih memilih pekerjaan sebagai buruh pabrik, pedagang, dan profesi lainnya yang dianggap lebih stabil. Kedua, keterbatasan akses informasi yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Ketiga, kurangnya pemasaran produk

UMKM yang menghambat perluasan pasar dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam menganalisis ketiga permasalahan ini, digunakan teori (Hutomo, 2000) yang membagi pemberdayaan ekonomi ke dalam tiga aspek utama, yaitu sumber daya, sarana prasarana, dan permodalan. Ketiga aspek ini menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat agar lebih berdaya dan berkelanjutan.

### 1. Sumber Daya Manusia Dan Alam

Minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo, merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aspek sumber daya dalam teori (Hutomo, 2000). Teori ini menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam pemberdayaan masyarakat, sementara sumber daya alam juga memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup (Hutomo, 2000). Sayangnya, banyak pemuda di desa ini lebih memilih bekerja di sektor industri seperti pabrik dibandingkan melanjutkan profesi sebagai nelayan kupang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang lebih menjanjikan secara finansial dan stabilitas ekonomi yang lebih baik di sektor lain. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Balongdowo, Pak Soliq, dalam wawancaranya sebagai berikut.

*“Banyak pemuda pemudi enggan menjadi nelayan kupang bukan karena tidak mau, tapi karena sudah punya pekerjaan. Rata-rata kerja di pabrik. Realistisnya mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena pendapatan lebih stabil dan ada tunjangan. Kalau*

*jadi nelayan, hasilnya tidak menentu, apalagi kalau cuaca sedang buruk atau hasil tangkapan sedikit.”* (narasumber Soliq, diwawancarai oleh penulis, Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan dan preferensi tenaga kerja muda lebih condong ke sektor industri, dibandingkan dengan sektor perikanan yang membutuhkan keahlian spesifik dan memiliki risiko yang lebih tinggi. Ditambah lagi peluang kerja di sektor industri lebih menarik bagi generasi muda karena menawarkan gaji tetap, jam kerja yang lebih teratur, serta jaminan sosial yang lebih jelas dibandingkan pekerjaan sebagai nelayan yang bersifat tidak menentu dan bergantung pada kondisi alam. Selain itu, tidak adanya penyuluhan atau pelatihan dari desa untuk generasi muda juga memperkuat kecenderungan mereka untuk mencari pekerjaan di luar sektor perikanan. Pak Soliq, Kepala Desa Balongdowo, menambahkan.

*“Dari desa sendiri, kami hanya bisa mendukung secara administratif, seperti mengeluarkan surat keterangan usaha. Sedangkan untuk pembinaan langsung kepada generasi muda, itu biasanya dilakukan oleh dinas koperasi atau pihak lain di tingkat yang lebih tinggi.”* (narasumber Soliq, diwawancarai oleh penulis, Maret 2025).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa desa memiliki peran terbatas dalam mendukung pengembangan UMKM dan regenerasi tenaga kerja di sektor perikanan. Sebagai institusi pemerintahan tingkat desa, mereka hanya dapat memberikan bantuan administratif, seperti mengeluarkan dokumen resmi bagi pelaku

usaha. Sementara itu, pembinaan langsung yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan generasi muda dalam sektor perikanan menjadi tanggung jawab instansi yang lebih tinggi, seperti dinas koperasi dan lembaga terkait lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan pihak terkait agar program pemberdayaan dapat menjangkau

pemuda secara lebih efektif. Dari perspektif salah satu pelaku UMKM kuliner kupang, Bu Khoirun Nisa, yang telah mengembangkan usaha berbasis kupang sejak tahun 2002, ketertarikan generasi muda terhadap sektor ini semakin menurun. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar nelayan yang masih bertahan saat ini adalah mereka yang sudah berusia lanjut.



**Gambar 1. Pengolahan Kupang UMKM**

*Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)*

*“Tidak ada penerus dari generasi muda sehingga nelayan tetap yang sudah sepuh, tapi sekarang sudah hilang 50%. Anak-anak muda sekarang lebih memilih bekerja di pabrik atau sektor lain yang menawarkan pendapatan lebih stabil. Sementara menjadi nelayan, mereka harus menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan setiap harinya.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis, November 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, keterbatasan tenaga kerja muda dalam sektor ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku kupang. Jika dulu nelayan lebih banyak menangkap kupang putih, kini mereka lebih memilih kupang

merah karena faktor suplai. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam sektor perikanan juga berdampak pada ekosistem perikanan itu sendiri. Kurangnya regenerasi nelayan di desa ini juga berpengaruh pada keberlangsungan usaha berbasis kupang. Untuk menarik pelanggan, Bu Khoirun Nisa berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk berbasis kupang, seperti kupang krispi, rengginang kupang, hingga kupang kering yang dapat bertahan hingga satu tahun untuk pengiriman luar kota.

*“Awalnya menarik pelanggan dari promosi media online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Google Maps, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dapat menambah pemasukan juga.”* (narasumber Khoirun Nisa,

diwawancarai oleh penulis, November 2024).

Hal tersebut memiliki arti bahwa tanpa adanya penerus dari kalangan muda, sektor ini tetap menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang berminat dalam sektor perikanan tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga pada rantai pemasaran produk berbasis kupang. Dari berbagai faktor yang disebutkan di atas, jelas bahwa minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan kupang di Desa Balongdowo sangat erat kaitannya dengan aspek sumber daya dalam teori (Hutomo, 2000). Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya regenerasi tenaga kerja di sektor perikanan, kurangnya penyuluhan bagi pemuda, serta perubahan pola ekonomi masyarakat yang lebih condong ke sektor industri. Jika tidak ada langkah konkret untuk meningkatkan minat generasi muda dalam sektor ini, maka keberlanjutan industri berbasis kupang di desa ini akan semakin terancam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang lebih terstruktur, seperti pelatihan keterampilan perikanan, bantuan modal usaha bagi generasi muda, serta optimalisasi pemasaran berbasis teknologi agar sektor ini tetap bertahan dan berkembang di masa depan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi penguatan sumber daya manusia yang bersifat regeneratif dan berbasis pelatihan keterampilan. Dalam konteks ini, teori pemberdayaan menurut (Chambers, 1995) sangat relevan, karena menekankan pentingnya *reversal learning*, di mana masyarakat lokal diberikan ruang untuk mendefinisikan kebutuhan dan solusinya sendiri, bukan hanya bergantung

pada intervensi dari luar. Begitu juga dengan konsep agensi dalam teori (Kabeer, 1999), di mana generasi muda perlu difasilitasi agar memiliki pilihan nyata dan kemampuan untuk bertindak dalam menentukan masa depan ekonominya, termasuk dalam memilih untuk tetap mengembangkan sektor kupang sebagai warisan lokal.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian (Saputri et al., 2024), yang menyoroti pentingnya pengelolaan potensi pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mantang Lama, Kabupaten Bintan, memiliki kesesuaian namun dengan beberapa tantangan yang berbeda. Kedua studi menunjukkan bahwa sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil laut, dapat dimanfaatkan sebagai basis utama pemberdayaan ekonomi. Namun, penelitian (Saputri et al., 2024) lebih menekankan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut, sementara dalam penelitian ini, permasalahan utama terletak pada minimnya regenerasi tenaga kerja muda di sektor perikanan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua penelitian mengakui pentingnya sumber daya manusia dan alam, faktor sosial seperti partisipasi dan minat generasi muda turut memengaruhi efektivitas pemberdayaan ekonomi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, relevansi antara kedua penelitian ini cukup kuat, tetapi dengan perbedaan dalam tantangan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

## **2.Sarana Prasarana**

Keterbatasan akses informasi menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku UMKM di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo. Salah satu penyebab

utama dari permasalahan ini adalah alur informasi yang berjalan langsung dari Dinas Koperasi ke pelaku UMKM tanpa melalui desa sebagai perantara. Dalam teori (Hutomo, 2000), aspek sarana dan prasarana sangat penting dalam pertumbuhan usaha karena keberlanjutan suatu usaha tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada pemasaran (Hutomo, 2000). Jika informasi mengenai peluang pemasaran dan produksi tidak tersampaikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan berisiko mengalami stagnasi bahkan penurunan. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Balongdowo, Pak Soliq, beliau menjelaskan:

*“Permodalan awal UMKM di desa ini sepenuhnya berasal dari modal mandiri yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu sendiri. Desa tidak pernah menyediakan dukungan permodalan, baik dalam bentuk dana maupun alat produksi. Namun, jika melihat dari skala yang lebih luas, terdapat bantuan dari pemerintah, terutama melalui dinas koperasi, yang langsung memberikan permodalan dalam bentuk uang serta peralatan usaha kepada pelaku UMKM tanpa melalui pemerintah desa sebagai perantara. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai bantuan yang tersedia tidak selalu tersebar dengan merata di kalangan pelaku UMKM, sehingga hanya sebagian yang dapat memanfaatkannya secara optimal.”* (narasumber Soliq, diwawancarai oleh penulis, Maret 2025).

Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki peran aktif dalam mendukung permodalan maupun

menjadi penghubung dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang kurang mendapatkan informasi yang diperlukan terkait bantuan permodalan, peluang inovasi produk, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Tanpa adanya peran aktif dari desa, keterbatasan akses informasi semakin memperburuk kondisi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dan arahan lebih lanjut dalam mengembangkan bisnis mereka. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait bantuan permodalan, inovasi produk, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Permasalahan akses informasi ini juga berdampak pada inovasi produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM (Nugroho & Andarini, 2020). Bu Khoirun Nisa, salah satu pelaku usaha di desa tersebut, menyatakan bahwa ia harus berinovasi dari produk kerupuk kupang menjadi kupang krispi, rengginang kupang, serta berbagai olahan kupang lainnya agar produk lebih tahan lama dan dapat dipasarkan ke luar kota.

*“Kami juga mencoba membuat kupang kering untuk pengiriman luar kota yang kemudian diolah kembali menjadi lontong atau petis. Dengan cara ini, kami berharap produk olahan kupang bisa lebih mudah diterima di daerah lain tanpa mengalami penurunan kualitas. Namun, karena kurangnya informasi mengenai standar pengemasan yang sesuai dengan ketentuan distribusi luar daerah, kami harus mencari sendiri metode yang tepat agar kupang kering tetap segar dan memiliki daya simpan yang lebih lama.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis,

November 2024).

Kurangnya akses informasi membuat pelaku usaha harus mencari cara sendiri untuk beradaptasi dengan permintaan pasar tanpa adanya bimbingan atau arahan yang lebih terstruktur. Jika ada pendampingan yang lebih intensif dari dinas terkait atau pihak desa dalam memberikan informasi mengenai teknik pengolahan dan distribusi, maka produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar luar daerah secara optimal. Pemasaran juga menjadi tantangan utama bagi UMKM di Desa Balongdowo. Awalnya, mereka menarik pelanggan melalui promosi media online seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Facebook*, serta *Google Maps*. Namun, keterbatasan informasi dan kurangnya pendampingan dalam strategi pemasaran digital membuat jangkauan pasar mereka masih terbatas. Padahal, menurut teori Hutomo (2000), tersedianya sarana dan prasarana pemasaran merupakan faktor krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan akses informasi yang lebih baik, UMKM bisa lebih memahami teknik pemasaran digital dan memperluas jangkauan pelanggan mereka.

Siklus produksi UMKM di desa ini juga tidak menentu karena bergantung pada hasil laut yang kemudian dibagikan ke pengepul sebelum sampai ke pelaku usaha. Bu Khoirun Nisa, menjelaskan:

*“Produksi setiap hari belum pasti karena sangat bergantung pada hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan, yang kemudian didistribusikan ke pengepul sebelum akhirnya dibagi lagi oleh warga yang menjadi pelaku usaha. Terkadang, hasil tangkapan yang sedikit*

*membuat bahan baku sulit didapatkan, sehingga proses produksi harus tertunda atau bahkan dihentikan sementara.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis, November 2024).

Kurangnya akses informasi mengenai pola permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku membuat pelaku usaha kesulitan dalam menyusun strategi produksi yang lebih terstruktur. Jika ada sistem yang lebih baik untuk memantau pasokan dan distribusi bahan baku, pelaku usaha dapat merencanakan produksi dengan lebih efisien, mengurangi resiko keterlambatan, serta mengoptimalkan hasil produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, sistem kerja yang masih berbasis keluarga tanpa pegawai tetap semakin memperumit upaya untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas dan tidak adanya struktur organisasi yang jelas, pelaku UMKM sering kali kesulitan memenuhi permintaan yang lebih besar atau melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Jika ada akses ke informasi dan bantuan dalam pengelolaan tenaga kerja, maka pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan ekspansi bisnis.

Dalam aspek pendapatan dan sarana prasarana, kondisi UMKM di Desa Balongdowo masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Menurut Bu Khoirun Nisa, omzet per bulan yang diperoleh dari usahanya berkisar sekitar 18 juta rupiah. Namun, omzet tersebut tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh momen-momen tertentu.

*“Omzet menurun saat pendaftaran sekolah karena masyarakat lebih fokus pada biaya pendidikan anak-anak mereka, tetapi*

*meningkat saat ada hajatan dan Lebaran karena permintaan untuk catering melonjak.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis, November 2024).

Selain itu, usaha ini tidak memiliki pegawai tetap, melainkan hanya melibatkan sekitar 10 orang dari keluarga sendiri yang bekerja secara serabutan dari rumah masing-masing. Dalam hal sarana prasarana, ia menyatakan bahwa alat produksi yang digunakan dalam usahanya berasal dari investasi pribadi tanpa bantuan dari pihak desa. Kendati demikian, meskipun memiliki alat sendiri, keterbatasan informasi mengenai cara meningkatkan produktivitas dan pemasaran masih menjadi hambatan utama dalam perkembangan usahanya.

Berdasarkan teori (Hutomo, 2000), aspek sarana dan prasarana dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya mencakup alat produksi, tetapi juga akses informasi yang mendukung pemasaran yang optimal. Jika desa lebih dilibatkan dalam distribusi informasi dari Dinas Koperasi, pelaku UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap pelatihan, peluang bantuan modal, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif agar informasi tidak hanya mengalir satu arah dari pemerintah ke pelaku UMKM, tetapi juga melalui pemerintah desa sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan berbagai pihak. Keterbatasan akses informasi bagi UMKM di Desa Balongdowo menjadi tantangan yang signifikan dalam pengembangan usaha mereka. Dengan adanya distribusi informasi yang kurang optimal, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk

berkembang. Sesuai dengan teori (Hutomo, 2000), prasarana produksi dan pemasaran yang baik harus mencakup akses informasi yang memadai agar hasil produksi tidak hanya berhenti di tahap pembuatan, tetapi juga dapat dijual dengan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, pelibatan desa sebagai jembatan informasi antara Dinas Koperasi dan UMKM perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa tersebut.

Kondisi ini menggambarkan pentingnya keterlibatan struktur lokal (pemerintah desa) dalam mendukung diseminasi informasi dan pembangunan ekosistem pendukung UMKM. Dalam teori pemberdayaan menurut (Narayan, 2005), keberdayaan masyarakat akan meningkat apabila mereka memiliki akses terhadap *informasi, inklusi sosial, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi*. Teori ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan hanya bentuk fisik, tetapi juga melibatkan sistem informasi dan jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara kolektif.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu milik (Yani & Mustamiin, 2024) mempunyai kesesuaian dalam indikator sarana prasarana. Penelitian terdahulu yang meneliti pemberdayaan ekonomi kreatif di Dusun Montong Mesirdesa Borok Toyang, menempatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Namun, perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus pengembangannya. Penelitian ini menyoroti keterbatasan akses informasi sebagai hambatan utama dalam optimalisasi sarana prasarana, penelitian Yani dan Mustamiin lebih menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan

infrastruktur yang tersedia. Relevansi kedua penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya sekadar tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga harus didukung oleh alur informasi yang efektif agar benar-benar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

### 3. Permodalan

Kurangnya pemasaran produk UMKM di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo akibat keterbatasan modal merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha kecil. Dalam teori (Hutomo, 2000), aspek permodalan tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dana semata, tetapi juga harus bersifat tidak menimbulkan ketergantungan serta mampu mendorong pengusaha kecil untuk berkembang secara mandiri (Hutomo, 2000). Dengan demikian, permodalan yang diberikan harus bersifat stimulatif dan bukan hanya bantuan konsumtif, sehingga UMKM dapat memperluas jaringan pemasarannya tanpa terhambat oleh keterbatasan modal. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Balongdowo, Pak Soliq, beliau menyatakan bahwa.

*“Permodalan awal bagi para pelaku UMKM di desa ini sebagian besar berasal dari modal mandiri yang mereka kumpulkan sendiri. Dari pihak desa, sejauh ini belum pernah ada dukungan permodalan secara langsung, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas lainnya. Namun, jika melihat dari pemerintah pusat maupun daerah, terdapat beberapa bentuk bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun alat produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Bantuan tersebut*

*umumnya disalurkan melalui dinas koperasi yang langsung berhubungan dengan para pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha mereka.”* (narasumber Soliq, diwawancarai oleh penulis, Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa permodalan yang diterima UMKM di desa tersebut lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan lembaga tertentu, bukan dari tingkat desa. Dengan kata lain, meskipun terdapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana atau alat produksi, namun dukungan tersebut belum berasal dari tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya juga memiliki peran dalam membantu pertumbuhan UMKM lokal. Keterbatasan dukungan dari pemerintah desa ini dapat menyebabkan akses permodalan menjadi lebih sulit bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan segera untuk mengembangkan bisnis mereka (Chairina et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan permodalan di tingkat desa perlu diperhatikan dengan serius agar desa dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan akses lebih luas kepada pelaku UMKM, baik melalui kebijakan lokal, skema bantuan yang lebih terstruktur, ataupun program pendampingan yang berkelanjutan. Dengan adanya peran yang lebih aktif dari desa, UMKM akan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk mereka.

Permodalan yang memadai sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, baik dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun dalam memperluas pasar. Salah satu contoh nyata adalah pengalaman yang dialami

oleh Bu Khoirun Nisa, seorang pelaku UMKM di desa tersebut. Ia menyatakan bahwa dengan adanya tambahan modal, usahanya dapat berkembang lebih jauh.

*“Setelah ada tambahan modal, usaha saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Awalnya, kami hanya mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan produksi, tetapi dengan hasil yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya bisa ditingkatkan untuk*

*membeli berbagai mesin produksi. Saat ini, kami sudah memiliki 10 mesin yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari jumlah tersebut, 7 mesin diperoleh dari hasil keuntungan usaha yang kami kumpulkan secara mandiri, sedangkan 3 mesin lainnya merupakan bantuan dari PLN Sidoarjo.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis, November 2024).



**Gambar 2.** Alat Produksi Bantuan PLN Sidoarjo

*Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)*

Bantuan modal yang diterima ini membuktikan bahwa ketika UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan secara bertahap mengembangkan usaha mereka. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa beberapa bantuan yang diterima berasal dari sponsor melalui pengajuan proposal dalam program kampung Kupang dan bantuan UMKM Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan pelaku UMKM yang aktif mencari peluang bisa mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pergeseran bahan baku yang berpengaruh terhadap

produksi dan pemasaran. Bu Khoirun Nisa juga mengungkapkan:

*“Sekarang nelayan lebih banyak mengambil kupang merah dibandingkan dengan kupang putih. Hal ini terjadi karena pasokan kupang putih sudah banyak disuplai ke berbagai tempat, sehingga jumlah yang tersedia untuk diproses oleh pelaku UMKM di desa ini menjadi lebih sedikit. Akibatnya, kami harus menyesuaikan bahan baku yang digunakan dalam produksi dan mencari strategi baru agar tetap bisa memenuhi permintaan pasar.”* (narasumber Khoirun Nisa, diwawancarai oleh penulis,

November 2024).

Pergeseran ini mempengaruhi variasi produk yang ditawarkan dan menuntut UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasarannya. Oleh karena itu, bantuan modal yang diberikan sebaiknya juga mencakup aspek inovasi dalam pemasaran agar produk tetap kompetitif di pasaran. Permodalan yang tepat akan sangat membantu dalam membangun sistem pemasaran yang lebih efektif. Seperti yang dikatakan oleh Pak Soliq:

*“Pemasaran produk UMKM di desa ini dilakukan dengan dua metode utama, yaitu secara offline melalui penjualan langsung kepada pelanggan di pasar atau toko lokal, serta secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.”* (narasumber Soliq, diwawancarai oleh penulis, Maret 2025).

Pendekatan online yang sudah diterapkan oleh beberapa pelaku usaha di desa ini menunjukkan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pemasaran akibat modal yang minim. Namun, tanpa adanya pendampingan dan permodalan yang berkelanjutan, tidak semua UMKM dapat secara optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran mereka. Berdasarkan teori (Hutomo, 2000), permodalan yang diberikan kepada UMKM sebaiknya bersifat mendukung kemandirian pelaku usaha agar mereka tidak bergantung pada bantuan secara terus-menerus. Dalam konteks Desa Balongdowo, solusi permodalan yang dapat diterapkan adalah skema dana bergulir, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan pemasaran digital agar

UMKM dapat lebih mandiri dalam memasarkan produknya. Dengan begitu, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat berkembang lebih jauh dan meningkatkan daya saingnya di pasar yang lebih luas. Keterbatasan modal menjadi faktor utama dalam permasalahan pemasaran UMKM di Desa Balongdowo. Namun, dengan pendekatan permodalan yang sesuai dengan teori (Hutomo, 2000), yaitu tidak menimbulkan ketergantungan tetapi mendorong pertumbuhan, UMKM dapat berkembang secara lebih mandiri. Dukungan permodalan harus mencakup tidak hanya dana, tetapi juga alat, pelatihan, serta strategi pemasaran berbasis digital agar produk-produk UMKM di desa ini dapat lebih dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, strategi permodalan yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan menjadi sangat penting. Menurut teori (Korten, 1984), pemberdayaan ekonomi tidak hanya bicara tentang dana, tetapi tentang penciptaan sistem sosial yang memungkinkan masyarakat mengelola dan memperluas akses terhadap sumber daya tersebut. Selain itu, teori (Kaplan, 1999) menyebut bahwa keberhasilan pemberdayaan tergantung pada empat pilar: visi, niat, keterampilan, dan struktur organisasi, yang semuanya bisa dibentuk melalui penguatan kelembagaan UMKM secara lokal.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, sejalan dengan penelitian oleh (Yani & Mustamiin, 2024) yang menyoroti pentingnya permodalan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif di Dusun Montong Mesirdesa Borok Toyang. Penelitian dahulu menunjukkan bahwa tanpa permodalan yang cukup, UMKM sulit untuk berinovasi dan memperluas jaringan pemasaran. Namun, terdapat

perbedaan dalam pendekatan permodalan antara kedua studi. Di dalam penelitian ini, bantuan modal lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan lembaga tertentu, sementara pada studi (Yani & Mustamiin, 2024), pendekatan yang digunakan lebih bersifat partisipatif dengan mendorong kolaborasi antara UMKM dan komunitas lokal. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian menunjukkan relevansi dalam menyoroti pentingnya permodalan, perbedaan dalam metode implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada strategi distribusi dan pemanfaatan yang tepat.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balongdowo melalui pendekatan ekonomi lokal masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek sumber daya, rendahnya minat generasi muda dalam melanjutkan profesi nelayan kupang berpotensi menghambat keberlanjutan usaha berbasis sumber daya alam lokal. Dari aspek sarana prasarana, keterbatasan akses informasi dan minimnya peran pemerintah desa sebagai penghubung menyebabkan pelaku UMKM kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang bantuan dan pelatihan. Sementara itu, dari aspek permodalan, UMKM sebagian besar masih mengandalkan modal mandiri dan bantuan eksternal yang belum terintegrasi secara sistematis. Meskipun demikian, pelaku UMKM telah menunjukkan adaptasi melalui inovasi produk dan pemanfaatan pemasaran digital secara mandiri. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara

pelaku UMKM, pemerintah desa, dan instansi terkait agar pemberdayaan ekonomi lokal dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

### **2. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balongdowo. **Pertama**, pemerintah desa perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator dan penghubung informasi antara dinas terkait dan pelaku UMKM. Peran ini penting agar informasi mengenai bantuan, pelatihan, dan strategi pemasaran dapat diakses secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

**Kedua**, dinas koperasi dan instansi lain yang terkait perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan pemerintah desa dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar tepat sasaran.

**Ketiga**, pelaku UMKM didorong untuk membentuk paguyuban atau kelompok usaha bersama yang dapat berfungsi sebagai wadah kolaborasi, pertukaran informasi, serta sarana memperkuat posisi tawar di pasar. Dengan adanya organisasi semacam ini, pelaku usaha tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dan lebih mudah dalam mengakses berbagai program pendukung.

**Keempat**, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang bentuk kelembagaan lokal yang efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, serta mengeksplorasi strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal yang lebih partisipatif dan berorientasi jangka panjang.

## REFERENSI

- Arisky, Y., & Satriya, H. E. (2022). Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Kupang Di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 1990-2020. *Journal Pendidikan Sejarah*, 12(4), 1–9.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Kecamatan Candi Dalam Angka 2023*. Sidoarjokab.Bps.Go.Id. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/3f30cc76a1daa6f666225595/kecamatan-candi-dalam-angka-2023.html>
- Chairina, N., Muhayati, Y., Fawwaz, F., Amelianur, M. H., & Aldiansyah, R. (2025). STRATEGI PEMASARAN UMKM DESA PARIGI. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 229–237.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*. *Sage Journal*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Haslinah, A., Tahir, U., Al Imran, H., Asfahani, A., & Larisu, Z. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Lingkungan Hijau Bebas Polusi Di Kota Makassar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8906–8912. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20062>
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Bappenas.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kaplan, A. (1999). *The development of capacity*. United Nations Non-Governmental Service (NGLS).
- Korten, D. C. (1984). Strategic organization for people-centered development. *Public Administration Review*, 44(4), 341–352.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Narayan, D. P. (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. World Bank Publications.
- Nugroho, R. H., & Andarini, S. (2020). Strategi pemberdayaan UMKM di pedesaan berbasis kearifan lokal di era industri 4.0 menuju era society 5.0. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 1(01).
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37.
- Saputri, S., Dwi Putri, F., Mustari, O., Riyadi, A., Khatijah, S., & Wahyuni, S. (2024).

- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Potensi Di Desa Mantang Lama, Kabupaten Bintan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 103–123.  
<https://doi.org/10.33369/jsn.10.1.103-123>
- Tojiri, Y., Putra, H. S., & Faliza, N. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Yani, A., & Mustamiin, M. Z. (2024). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KREATIF PADA MASYARAKAT DUSUN MONTONG MESIRDESA BOROK TOYANG. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 12(1), 48–55.